

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Propinsi Sulawesi Selatan, satu dari 34 Propinsi di Indonesia dengan segala potensi sumber daya alam dan posisi yang strategis, julukan sebagai pintu dari Kawasan Timur Indonesia juga disematkan pada Propinsi ini. Penyematan julukan tersebut tentunya tidak sekedar isapan jempol saja, Propinsi Sulawesi Selatan berbenah dengan beberapa program aksi yang mumpuni. Propinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini terus memperlihatkan geliat perekonomian yang cukup bergairah di Kawasan Timur Indonesia. Apalagi saat ini Propinsi Sulawesi Selatan telah didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung yang cukup baik, tersedianya potensi dan peluang yang siap dikembangkan serta besarnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah.

Apalagi lebih lanjut, kebijakan pemerintah propinsi utamanya periode kedua dari kepemimpinan H. Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nukman dalam masa bakti 2013-2018 telah fokus pada pengembangan sektor infrastruktur, pengembangan komoditas pangan serta industry hilir guna lebih memacu perekonomian dan pendapatan ekonomi wilayah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan.

Namun kesemuanya itu akan kelihatan sulit ketika tersandung oleh ketersediaan modal untuk kesuksesan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman, dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing.¹ Masuknya investasi dari luar ke dalam negeri menjadi harapan baru dalam proses pembangunan sebuah Negara, Negara-negara sedang berkembang biasanya memiliki problem awal dalam pembangunan,

¹Paul Krugman, *Majalah SWA*, 05/XIV/5-18 Maret 1998 dalam Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf, Yogyakarta, 2001, hal.77

yaitu terletak pada kelangkaan keberadaan modal untuk pembangunan itu sendiri, sehingga jika Negara berkembang tersebut memiliki keinginan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka tentunya harus terus berupaya untuk menarik investasi asing masuk ke negaranya.

Kemampuan untuk menyiapkan lahan investasi, mengelola investasi yang telah diinvestasikan oleh pihak lain bahkan sampai memberi jaminan keberlangsungan dan manfaat investasi pada setiap jenis investasi apapun di wilayah tersebut sangat diperlukan, hal ini sehubungan dengan ketertarikan pihak lain utamanya investor dari luar negeri untuk berinvestasi atau menanamkan modal secara terus menerus di wilayah tersebut, kemampuan pemerintah mengelola investasi asing tersebut berbanding lurus dengan besarnya keinginan orang-orang akan keuntungan atau minimalisir kerugian terhadap investasi yang telah diberikannya di tempat itu, tidak terkecuali wilayah-wilayah seantero Indonesia.

Letak Indonesia yang sangat strategis diantara dua benua Asia dan Australia yang sangat menguntungkan bagi perdagangan, ditambah dengan kenyataan bahwasanya wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni dan menjadi daya tarik asing untuk melakukan investasi di Indonesia, faktor lain yang mendukung Indonesia sebagai kawasan investasi yang menguntungkan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang secara kuantitas dan kualitas tercukupi dan mumpuni untuk membantu menyukseskan jalannya roda investasi yang baik di Indonesia, ketersediaan sumber daya manusia yang ada juga didukung dengan tidak tingginya pembiayaan dalam persiapan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya manusia tersebut.

Tingginya potensi keinginan dalam berinvestasi asing di Indonesia dapat terlihat dari sebuah laporan yang dirilis oleh United Nations Conference on Trade and

Development (UNCTAD) yang menggambarkan tentang indeks peringkat negara dengan merujuk pada potensi arus masuk investasi dalam kasus Asean².

Tabel 1.1: Peringkat Negara Menurut Indeks Potensi Arus Masuk PMA di ASEAN

Negara	Indeks Potensi Arus Masuk PMA				
	1990	1995	2000	2004	2005
Brunei Darussalam	29	31	35	50	50
Indonesia	44	65	76	103	100
Malaysia	38	33	31	35	35
Filipina	83	70	61	71	74
Singapura	15	3	2	2	21
Thailand	40	44	53	59	62
Vietnam	78	88	83	80	80

Data UNCTAD 2006

Dalam tabel indeks potensi arus masuk PMA dengan studi kasus ASEAN ini terlihat peningkatan yang signifikan terhadap potensi arus masuk PMA di ASEAN, secara bertahap Indonesia mampu menduduki peringkat pertama dari tujuh Negara ASEAN dalam potensi masuknya investasi ke Negara-negara ASEAN, utamanya setelah krisis moneter yang menerpa Indonesia di tahun 1998, sebuah bukti atas kembalinya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia untuk berinvestasi di Negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni, salah satunya Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Pintu dari kawasan Timur Indonesia.

Kembali pada pembicaraan awal, Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu Propinsi terbaik Indonesia yang terletak diantara posisi barat dan timur Indonesia dan terkenal dengan sebutan gerbang dari Kawasan Timur Indonesia, dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang pesat dan dinilai paling maju di Kawasan Timur Indonesia.

² UNCTAD, *World Investment Report 2006*, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Investment, 2006.

Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia investasi, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian perkebunan, energi dan infrastruktur. Masyarakatnya, selain sudah maju, juga dikenal memiliki pendirian dan wawasan yang kuat dalam menyikapi berbagai perkembangan politik, ekonomi, hukum, dan hankam di Indonesia selama ini.

Kualitas Sumber daya Manusia sebagai angkatan kerja yang mumpuni dalam menyukseskan investasi di Sulawesi Selatan juga didukung dengan ketersediaan lembaga pendidikan yang baik yaitu Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selain itu menjamur pula institusi pendidikan Negeri dan Swasta lainnya di wilayah ini baik di ibukota propinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang telah mencetak lulusan-lulusan yang siap bersaing di pasar kerja.

Selain sudah maju, Sulawesi Selatan juga dikenal kaya akan sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan dan perikanan laut. Daerah ini termasuk salah satu lumbung pangan terbesar di kawasan timur Indonesia yang sangat menguntungkan bagi investor asing untuk menanamkan investasinya di kawasan ini, selain itu bila dilihat secara lebih obyektif lagi, Sulawesi Selatan memiliki potensi untuk menjadi daerah yang makmur dan sejahtera, selain itu ketersediaan lahan investasi didukung dengan kekayaan alam Sulawesi Selatan diantaranya tambang nikel di Kabupaten Luwu, gas alam di Kabupaten Wajo, dan Semen di kabupaten Maros dan Pangkajene, dan marmer di beberapa kabupaten. Selain potensi sumber daya alam, Sulawesi Selatan juga memiliki kekayaan lain berupa daerah wisata utama seperti di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Selayar.³

Kalau kita merujuk pada laporan Triwulan pertama pada tahun 2014 dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Republik Indonesia, Sulawesi Selatan menduduki posisi

³ Tim Peneliti Centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, *OTONOMI; Potensi Masa Depan Republik Indonesia*, Jakarta, Centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, 2001, Hal. 827-828

19 dari 34 Propinsi yang ada mengenai perkembangan investasi asing di Indonesia dengan nilai investasi yang berputar sebesar 47,2 Juta US\$ dalam 16 proyek yang sedang terlaksana.⁴

Perkembangan investasi asing di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan ini sepatutnya diapresiasi positif, selain itu posisi ini semestinya menjadi pelecut utamanya kepada pemerintah setempat berkenaan dengan upaya untuk menyukseskan program otonomi dan perluasan wewenang daerah dalam kebijakan peningkatan investasi asing di wilayah tersebut. Potensi yang besar berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan yang mumpuni ini selayaknya harus dimanfaatkan secara optimal, dan menaikkan peringkat Sulawesi Selatan sebagai wilayah tersukses dalam program investasi di Indonesia.

Kekayaan Sumber daya alam dan kepiwaian sumber daya manusia di Sulawesi Selatan juga ditopang dengan peningkatan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu menurut Publikasi BKPM RI soal potensi Investasi di Sulawesi Selatan, dituliskan keunggulan untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan yaitu:⁵

1. Posisi yang strategis sebagai pusat pelayanan angkutan udara dan laut di Kawasan Timur Indonesia dan Pusat pelayanan jasa perdagangan, industri serta perbankan.
2. Wilayah yang relatif aman bagi kegiatan investasi di Indonesia, dimana gejolak masyarakat dan komunitas buruh relatif rendah.
3. Keanekaragaman potensi sumberdaya alam untuk investasi. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi kegiatan investasi.
4. Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang belum termanfaatkan secara maksimal.

⁴ Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, *Realisasi Penanaman Modal PMDN – PMA Triwulan I 2014*, 2014.

⁵ Badan Kerjasama dan Penanaman Modal RI, *Potensi Investasi Propinsi Sulawesi Selatan*, 2012.

5. Komitmen Pemerintah Daerah yang sangat kuat dalam memberikan kemudahan bagi Investor.
6. Ketersediaan Sumber daya manusia yang berkualitas.
7. Ketersediaan lahan yang masih luas, dan relatif murah.

Keunggulan untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan seperti yang dilansir oleh BKPM RI ini sesungguhnya harus ditopang pula dengan upaya dan kesiapan dalam memberikan kinerja terbaik pemerintah untuk mendukung dan ikut serta dalam menyukseskan program investasi asing di daerahnya, apalagi ketika daerah tersebut memang dilirik dengan beberapa keunggulan yang telah dilansir BKPM RI diatas, sepatutnya daerah menjaga kepercayaan investor dan secara bertahap dapat menciptakan masyarakat Sulawesi Selatan yang ramah akan investasi asing.

Salah satu upaya dan kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan adalah dengan mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam peningkatan investasi asing di Sulawesi Selatan yaitu BKPMD Propinsi Sulawesi Selatan dan jajaran terkait di daerah, dan BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan serta jajaran terkait di daerah, selain itu koordinasi dan kerjasama juga dilakukan dengan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki otoritas legislasi investasi asing, dan Biro Investasi dan Kerjasama Propinsi Sulawesi Selatan terkait pola marketing peningkatan investasi asing.

Para *stakeholder* ini memiliki tanggung jawab dalam memberi pemahaman, kepastian dan bukti kepada pihak investor asing atau pihak asing manapun yang ingin mengadakan kerjasama dengan Propinsi Sulawesi Selatan, apalagi potensi sumber daya alam Sulawesi Selatan sangat mendukung untuk terwujudnya investasi dan kerjasama asing di era otonomi daerah ini. Harapannya dengan adanya otonomi daerah ini bisa direspon positif dan dengan baik oleh pemerintah daerah dengan kerja-kerja yang nyata, utamanya menyambut tahun-tahun globalisasi ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengulas praktik diplomasi investasi asing yang terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan terkait dinamika kebijakan peningkatan investasi asing di propinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu penulis mengangkat judul “PERAN DIPLOMASI INVESTASI ASING DALAM PRAKTIK PARADIPLOMASI (Studi Kasus: Kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Dalam Peningkatan Investasi Asing Pada Tahun 2007-2014)”.

B. Tujuan Riset

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan kerjasama internasional.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan efek keberadaan konflik sebagai hambatan terhadap peningkatan investasi asing di Propinsi Sulawesi Selatan
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik peningkatan investasi asing di Propinsi Sulawesi Selatan.
- d. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan apa saja yang didapatkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan kebijakan dalam peningkatan investasi asing di Propinsi Sulawesi Selatan.

C. Kontribusi Riset

Adapun kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini sebagai pendalaman dan memperkaya kajian mengenai peningkatan investasi asing di daerah.
- b. Hasil penelitian ini akan berguna bagi para peneliti, mahasiswa, dan semua pihak yang tertarik untuk mengkaji tentang peningkatan investasi asing yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat, Propinsi, daerah dan pihak-pihak terkait dalam kebijakan peningkatan investasi asing yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- d. Dapat dijadikan bahan atau pedoman bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam melakukan praktik peningkatan investasi asing di wilayahnya masing-masing.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan peningkatan investasi asing pada tahun 2007-2014 ?

E. Tinjauan Pustaka

Bila kita melihat dengan seksama mengenai studi diplomasi investasi asing, studi ini memaknai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai sebuah instrumen yang penting untuk memperjuangkan kepentingan politik seperti perdamaian, kepentingan ekonomi seperti pembangunan daerah secara massif dengan dukungan yang mumpuni, kolaborasi kerjasama ekonomi antar negara secara lebih intensif, atau kepentingan sosial budaya untuk membangun komunitas humanis dan berperadaban.

Fenomena otonomi daerah dan keleluasaan berinvestasi asing di daerah jika dipahami dalam perspektif positif, justru dapat memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan yang selama ini tak terpecahkan melalui diplomasi politik, yang sulit memberikan *win-win solution*, yang ada hanya pada tataran diplomasi berhasil dengan kemenangan yang diraih dan diplomasi gagal dengan meraih kekalahan. Dalam konteks ini secara ideal otonomi daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.⁶

⁶ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*, Jakarta, Kemitraan Partnership, 2005, hal. 107

Menurut Pheni Chalid, penerapan otonomi daerah dewasa ini memberikan prospek yang menggairahkan bagi aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, di mana keduanya memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang berarti, *pertama*, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah akan berkorelasi positif dengan peningkatan penduduk; *kedua*, mendorong peningkatan pendapatan pada sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Ukuran pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan pemanfaatan sumberdaya di daerah yang dilakukan lebih optimal sehingga memotivasi proses pertukaran produksi lintas daerah maupun lintas sektor.⁷ Oleh karena itulah investasi asing menjadi isu penting bagi daerah-daerah pasca penerapan otonomi daerah di Indonesia, daerah berkompetisi untuk menggunakan segala potensi sebagai bagian dari proses diplomasi untuk menarik investasi asing ke daerahnya.

Paul Krugman yang menyatakan Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman, dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing.⁸ Masuknya investasi dari luar ke dalam negeri menjadi harapan baru dalam proses pembangunan sebuah Negara, Negara-negara sedang berkembang biasanya memiliki problem awal dalam pembangunan, yaitu terletak pada kelangkaan keberadaan modal untuk pembangunan itu sendiri, sehingga jika Negara berkembang tersebut memiliki keinginan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka tentunya harus terus berupaya untuk menarik investasi asing masuk ke negaranya.⁹

Penelitian juga dilakukan oleh D.Fischer dan M.Stater yang membahas tentang investasi asing di Tiongkok, mereka menyatakan bahwa sasaran utama yang mendasari kebijakan Tiongkok untuk membuka diri dengan dunia luar dan membolehkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh pihak asing untuk mengimpor teknologi maju dan keahlian manajerial serta menarik dana-dana asing. Dalam melakukan hal ini RRT

⁷ *Ibid.*, hal. 108-109

⁸ Sidik Jatmika, *Op.Cit.*, hal.77.

⁹ *Ibid.*,

dapat mengembangkan kualitas produk mereka sendiri, meningkatkan kapasitas mereka dan mempercepat modernisasi¹⁰

Bila ditelisik lebih jauh, studi tentang fungsi investasi asing sebagai diplomasi, tidak hanya sekedar soal ekonomi pembangunan sebuah Negara secara umum atau Daerah secara khusus, namun bisa juga menjangkau pada tataran yang lebih luas lagi, salah satunya soal perdamaian dan konflik. Dalam laporan risetnya yang berjudul “Trade Does Promote Peace: New Simultaneous Estimates of the Reciprocal Effects of Trade and Conflict”, Havard Hegre dkk menuliskan tak kurang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) dalam daftar 10 manfaat sistem perdagangan yang dikelolanya menempatkan, pada urutan pertama, “perdagangan membantu menjaga perdamaian karena pedagang biasanya enggan berseteru dengan para pelanggannya”.¹¹

Dalam kajian Fearon dan Gartzke, tabiat konflik yang ‘mahal’ juga telah menjadi isu sentral dalam aplikasi teori tawar-menawar (*bargaining theory*) dan karena itu menyimpulkan “hubungan komersial antar wilayah meningkatkan *likelihood* perdamaian karena perdagangan dan investasi memungkinkan adanya sinyal mahalnya sebuah konflik.”¹²

Dalam Studi Hegre, Fearon dan Gartzke ini semakin menunjukkan fungsi diplomasi investasi asing yang dimana ditemukan bahwasanya investasi asing di wilayah tersebut dapat mengelola konflik yang terjadi, dikarenakan dengan adanya perdagangan dan investasi yang menguntungkan dapat menciptakan kestabilan daerah dengan lebih mementingkan perdamaian daripada konflik, pada situasi ini, konflik menjadi barang yang mahal.

Dalam studi atau penelitian yang lain mengenai implementasi diadakannya diplomasi investasi asing juga dilakukan oleh Romayati Apriliyati (2015) yang kemudian tertuang dan dituliskan dengan terperinci dalam artikel jurnal yang berjudul Upaya

¹⁰ D.Fischer dan M.Stater, *Direct Investment In The PRC*, dalam A.J de Rood an R.W.Jagtenberg, *Yearbook Law & Legal Practice In East Asia*. Volume I, 1995, Hal. 53 dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 193.

¹¹ Saiful Mahdi, Artikel Berjudul Investasi dan Perdamaian Aceh.

¹² *Ibid.*,

Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”). Dalam penelitian mengenai bentuk implementasi dari diplomasi peningkatan investasi asing yang dilakukan oleh Indonesia sebagai institusi Negara dan pelaku diplomasi sebagaimana yang dituliskan oleh Romayati Apriliyati, disampaikan bahwasanya Indonesia memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam tata ekonomi dunia yaitu keunggulan posisi geos strategis, karena terletak di pusat daya tarik baru perekonomian global dimana Indonesia berkesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik, keunggulan dan kekayaan sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, keberadaan struktur sumber daya manusia usia produktif dan iklim yang relatif bersahabat, selayaknya potensi dengan berbagai macam keunggulan ini dapat bersinergi dengan kerjasama pemerintah dari pusat hingga daerah untuk dapat memetakan dan mengeksekusi keunggulan-keunggulan ini menjadi sebuah keuntungan yang nyata untuk daerah.¹³

Investasi utamanya pemberian modal memang diharapkan dapat memposisikan diri sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi baik secara investasi dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN) sangat diharapkan. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) tergantung dari daya tarik daerah dan negara, membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal, penciptaan masyarakat ramah investasi juga perlu agar diharapkan tidak terjadi gejolak-gejolak penentangan yang membuat kepercayaan investor memudar.

Salah satu dari potensi investasi di Indonesia berada di Propinsi Kepulauan Riau, di wilayah tersebut terdapat lebih dari 1500 perusahaan asing yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional dari Singapura, Amerika

¹³ Romayati Apriliyati, Artikel Jurnal JOM FISIP Vol.2, No.1 Universitas Riau; Upaya Diplomasi Indonesia Pada Peningkatan Investasi Asing di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus “Diplomatic Tour, Batam 7-9 September 2012”) , Riau, Universitas Riau, 2015.

Serikat, *United Kingdom*, Uni Emirat Arab, Malaysia, Jerman, dan negara-negara lainnya. Pada tanggal 19 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Batam-Bintan-Karimun sebagai *Free Trade Zone* untuk menarik lebih banyak lagi investor – investor internasional ke Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2011, total investasi asing yang ditanam di Provinsi Kepulauan Riau mencapai hingga USD 15 miliar.¹⁴

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan Diplomasi dalam peningkatan investasi asing di daerah yang dibawah koordinasi dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah berupa program *Diplomatic tour*, yaitu sebuah program dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berupaya untuk memperkenalkan provinsi-provinsi di Indonesia kepada para duta besar dan korps diplomatik yang telah diundang dengan harapan para tamu diplomatik ini dapat mengenal Indonesia dengan lebih baik. Para peserta *Diplomatic Tour* dapat berinteraksi secara langsung untuk menjajaki peluang bisnis dan kerjasama yang dapat digarap oleh semua pemangku kepentingan. *Diplomatic tour* merupakan salah satu upaya Kementerian Luar Negeri untuk menjembatani daerah dengan perwakilan negara-negara sahabat dan organisasi internasional, sehingga dapat menunjukkan secara langsung berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah.

Strategi beberapa negara dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan ekonomi khususnya dalam peningkatan investasi adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyediaan tenaga kerja yang handal, pemberian insentif serta peningkatan infrastruktur. Disamping itu, strategi yang ditempuh lainnya adalah berupa penyediaan kawasan strategis, ekonomis terkonsekuensi dan terpadu. Program *Diplomatic Tour* membuka peluang bisnis dari 2 (dua) sisi, dimana pada satu sisi terdapat potensi untuk menerima investasi dan disisi lain terdapat potensi untuk berinvestasi di negara para duta yang menghadiri program *Diplomatic Tour*. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hanya sebagai fasilitator, yang mempertemukan pihak – pihak yang berkepentingan dalam menjajaki kemungkinan kerjasama bisnis yang dapat di lakukan oleh

¹⁴ *Ibid.*,

seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau dengan para calon mitra luar negeri.¹⁵

Dampak dari strategi diplomasi Tour dalam peningkatan investasi asing yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terhadap investasi di Riau seperti apa yang yang didapatkan dari hasil penelitiannya yaitu peningkatan jumlah investor asing di Batam yang membuka peluang lapangan pekerjaan. Walaupun dalam pelaksanaannya lebih banyak tenaga kerja domestik dalam aktifitasnya namun mayoritas jabatannya ditempatkan pada status buruh. Sedangkan para *expatriate* ini lebih diutamakan dalam jabatan yang lebih tinggi, seperti tingkat pimpinan, professional, supervisor, dan yang paling sedikit adalah bagian teknis yang jumlah pekerja laki – laki sangat dominan dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan. Keadaan ini sesuai dengan harapan para investasi asing yang lebih mengutamakan tenaga ahli dari pada *low-middle-skill*. Total investasi pada tahun 2013 mencapai US\$ 16,467,103,359.13.¹⁶

Investasi swasta lebih dominan dibandingkan dengan investasi pemerintah, dan lebih dari separuh dari total investasi swasta di kuasai oleh investasi swasta asing atau Penanam Modal Asing (PMA). Pertumbuhan investasi swasta dari tahun 2009 hingga 2013 selalu mengalami peningkatan dan dalam kerjasama antar investor asing dan Indonesia, negara Singapura menjadi urutan pertama sebagai pemilik investasi asing terbesar di Kepulauan Riau. Namun demikian keterlibatan pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti dengan keberhasilan yang di raih pada kegiatan tersebut, harapannya Pemerintah Indonesia tetap memberi dukungan terhadap upaya dan pengembangan investasi tidak hanya di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki potensi. Dengan memperhatikan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas serta fasilitas – fasilitas yang memadai untuk mendukung perkembangan atau peningkatan investasi terlebih dari sektor asing.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

Sedangkan Takdir Ali Mukti, dalam buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (2013), mengatakan bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama ‘kedaulatan’ suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan ‘share’ kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.¹⁸ Inilah geliat lokal dalam ranah global yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing menuju era globalisasi yang penuh persaingan, tidak hanya Negara tapi juga wilayah setingkat propinsi atau daerah setingkat kabupaten/kota di dalam Negara tersebut.

Christy Damayanti menegaskan kembali bahwa paradiplomasi sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah daerah dalam bidang hubungan luar negeri mutlak diperlukan seiring dengan diterimanya paham diplomasi multi jalur (multitrack diplomacy) sebagai tuntutan riil kehidupan hubungan internasional dalam iklim globalisasi dan demokrasi.¹⁹

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah dimana setiap daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan lebih dari sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuka kerjasama internasional dalam upayanya untuk berkompetisi meningkatkan investasi asing yang dihadapi dengan tujuan agar pemerintah daerah bisa belajar dan mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak asing yang menguntungkan sehingga mereka bisa lebih memajukan daerah dengan segala potensi yang ada. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri akan tetapi membawa nama pemerintah pusat dan untuk itu Negara juga sama sekali tidak akan

¹⁸ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013.

¹⁹ Christy Damayanti, “Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN”, *Transformasi*, Vol.XIV, No 22, 2012.

kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah entitas yang sebelumnya memiliki peran dalam pergulatan internasional.

Paradiplomasi telah menjadi hal penting dalam pertumbuhan kerjasama kawasan dan meningkatnya desentralisasi sistem internasional. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional. Untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan kawasan baik itu se-kawasan maupun antar-kawasan menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah di tiap-tiap negara yang menghuni kawasan tersebut untuk saling berbagi dan saling menjaga dalam bingkai kerjasama demi mencapai kesejahteraan, keamanan bersama, dan cita-cita pembangunan.

Dari beberapa hasil penelitian mengenai diplomasi investasi asing yang telah disebutkan, Paul Krugman tentang investasi sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, Pheni Chalid tentang investasi dan desentralisasi, Hegre, Fearon dan Gartzke melakukan penelitian tentang fungsi diplomasi investasi asing yang tidak terbatas hanya persoalan pembangunan saja, tapi dapat juga mengelola perdamaian dan menyebabkan konflik sebagai barang yang mahal. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan D.Fischer dan M.Stater yang menemukan sebuah kenyataan bahwa di Tiongkok, investasi telah memberi manfaat dalam alih teknologi, masuknya dana-dana asing dan alih kemampuan manajerial. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Romayati Apriliyati, yang menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai pelaku diplomasi investasi asing dengan instrument *Diplomacy Tour* dalam peningkatan investasi asing di daerah-daerah seluruh Indonesia khususnya Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penelitiannya. Begitu pula dengan Takdir Ali Mukti dan Christy Damayanti yang membahas mengenai paradiplomasi sebagai instrument kerjasama oleh daerah.

Sedangkan dalam riset ini, penulis akan meneliti mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama internasional dalam peningkatan investasi asing yang terjadi. Daerah yang dimaksudkan penulis adalah Propinsi Sulawesi Selatan. Jadi, mengingat setiap daerah/wilayah memiliki masalah, pelaku yang melakukan diplomasi, dan

strategi kebijakan tersendiri terkait peningkatan investasi asing, maka riset yang dilakukan oleh penulis menjadi berbeda dengan riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Diplomasi Investasi Asing

Modal merupakan prasyarat pembangunan, modal dapat didapatkan dari pihak yang melakukan investasi di wilayah tersebut, salah satunya dengan adanya investasi asing, hal ini dapat kita rujuk dari tesis Paul Krugman yang menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing. Negara-Negara sedang Berkembang termasuk Indonesia biasanya memiliki problem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan. Artinya jika suatu Negara ingin meraih kembali pertumbuhan ekonominya, harus berupaya menarik modal asing.²⁰

Investasi asing merupakan sebuah hal yang penting bagi proses pembangunan sebuah negara khususnya Indonesia, hal ini sangat mendasar ketika hendak memahami konsep dasar investasi asing dalam pembangunan. Kenyataan bahwa kekuatan ekonomi potensial yang melimpah ruah di seluruh penjuru tanah air yang belum diolah dapat menjadi sebuah kekuatan ekonomi riil. Akan tetapi faktor mendasar yakni ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi, menjadikan semua kekuatan ekonomi potensial tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dalam bentuk yang sangat terbatas.

Pada sisi yang lain perkembangan hubungan internasional dengan kehadiran aktor baru yang dikenal dengan pemerintah daerah juga merangsang perkembangan investasi asing yang secara langsung mulai menyentuh dan berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah mengenai investasi di wilayah tersebut, keadaan ini membentuk geliat lokal dalam interaksi global.

Semakin berkembangnya dua kondisi ini juga memunculkan sebuah pertanyaan apa yang menjadi ketertarikan sehingga diplomasi meningkatkan investor asing untuk

²⁰Sidik Jatmika, Op.Cit., hal.77.

berinvestasi di wilayah tersebut dapat berhasil. Bila kita mengutip dari Alan M. Rugman yang menyatakan ada dua faktor penting yang mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.²¹

Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, dan modal, teknologi, tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut sebagai *human capital*.

Adapun yang diposisikan sebagai variabel non-ekonomi yang dapat memberi efek menguntungkan yang dapat menarik investor asing adalah keeluruhan kondisi politik, budaya dan sosial yang melekat pada suatu Negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu Negara, baik tuan rumah ataupun pemerintah dari Negara asal penanam modal itu.²²

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi penanam modal asing, menurut Rugman, adalah variabel internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan yang melakukan investasi tersebut. Hal mana setiap investor sebisa mungkin dapat mewarnai investasinya dengan karakteristik yang khas, yang ditujukan guna memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya. Termasuk di dalamnya adalah struktur dan ketrampilan manajemen; tehnik pemasaran; riset dan pengembangan (R &D), serta orientasi strategi secara menyeluruh.

Apa yang diungkapkan oleh Alan M. Rugman ini juga dikuatkan oleh Sjöholm yang menyatakan bahwa faktor stabilitas politik dan keamanan suatu negara yang paling dipertimbangkan oleh investor asing sebagai keinginan untuk melakukan investasi di wilayah tersebut, teori ini kembali diperkuat dengan riset yang diadakan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 2003 menyatakan bahwasanya faktor

²¹ Alan M. Rugman, *International Business: Form and Environment*, (New York: Mc Graw Hill Book, 1985), hal.73-92.

²² G. Katosapoetro, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.25

kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktivitas serta infrastruktur fisik merupakan indikator-indikator yang berpengaruh terhadap daya tarik investor asing untuk melakukan investasi-investasi di Indonesia.²³

Dalam posisi yang lain, keberadaan investasi asing ini juga memberi manfaat bagi wilayah tempat berinvestasi, manfaat itu adalah dengan adanya perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari Negara dengan tingkat pertahanan, keamanan dan militer yang kuat maka niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.²⁴

Dari paparan diatas dapat ditemukan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan dapat muncul dari hubungan kerjasama investasi asing, sehingga diplomasi peningkatan investasi di daerah selayaknya patut diperjuangkan, usaha-usaha ini selayaknya mendapat apresiasi positif pemerintah untuk bekerja keras meningkatkan investasi asing di daerahnya dan masyarakat yang mampu memposisikan dirinya sebagai masyarakat ramah investasi, dalam era yang semakin maju dan bergerak cepat ini, geliat lokal dalam ranah global adala suatu keharusan dan dijalankan dalam semangat *think globally, act locally*.

2. Konsep Paradiplomasi

Hubungan Internasional mengalami perkembangan yang sangat luas, baik dalam lingkup teori maupun praktik, hal ini juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang dewasa ini cakupannya dapat melewati batas-batas Negara dan arus globalisasi yang semakin tidak mengenal ruang dan waktu melahirkan berbagai macam bentuk dan cara-cara diplomasi yang baru. Fenomena tersebut perlahan tapi pasti mulai menggantikan cara-cara diplomasi tradisional yang cenderung terlihat sangat kaku yang hanya dijalankan oleh sekelompok orang terlatih yang ditunjuk resmi oleh pemerintah suatu Negara, apa yang kita kenal dengan diplomat. Hal ini menjadi cikal bakal lahirnya diplomasi yang modern yang sangat fleksibel dan memunculkan berbagai macam aktor yang berperan didalamnya.

²³ Sri Muwarni, *Tesis Analisi Kebijakan Moneter Kaitannya Dengan Penanaman Modal Asing: Pendekatan Taylor Rule*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

²⁴ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, Hal.45.

Dalam kondisi yang lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang letak geografisnya terbentang dari ujung barat di sabang hingga ujung timur di merauke memiliki tantangan tersendiri dalam terwujudnya kesejahteraan rakyat dan dengan adilnya pemerataan pembangunan di sector bidang apapun terhadap wilayah manapun dan di pulau apapun, baik pulau terdekat maupun pulau terdepan digaris batas wilayah Indonesia ditengah begitu massifnya persaingan pembangunan baik dalam tataran Negara maju maupun Negara berkembang. Sehingga, kebijakan desentralisasi oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan dan diyakini merupakan salah satu solusi yang efektif dan efisien untuk meratakan pembangunan di setiap daerah di kepulauan Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh Indonesia adalah dengan diadakannya reformasi birokrasi dan pembangunan dengan terwujudnya kebijakan otonomi daerah, dari daerah, oleh daerah dan untuk daerah.

Otonomi daerah ini adalah salah satu bentuk pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah ditiap propinsi dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang teguh terhadap Undang-Undang Dasar Negara. Dimana hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif efisien, dan berwibawa demi mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam keterkaitannya dengan reformasi birokrasi dan pembangunan ini, maka munculnya aktor baru bernama pemerintah daerah mempengaruhi pengembangan hubungan yang bersifat transnasional.²⁵ Perkembangan situasi dunia, aktor, dan teknologi informasi membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern dan beragam. Saat ini dalam pendefinisian diplomasi terbagi menjadi dua bagian penting yaitu diplomasi tradisional atau diplomasi konvensional (first track diplomacy) atau diplomasi modern yang disebut sebagai diplomasi publik.

²⁵ Sidik Jatmika, Op.Cit., hal.54.

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah '*Paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an oleh ilmuan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah '*Parallel diplomacy*' menjadi '*Paradiplomacy*'. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*'. Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) untuk konsep ini adalah '*micro-diplomacy*'.²⁶

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', pemerintah lokal/regional/pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.²⁷ Dalam era tanpa tapal batas ini maka tentunya keberadaan paradiplomasi menjadi fenomena yang kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non negara dalam arena hubungan internasional. Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama dengan pihak-pihak yang berada di luar batas yurisdiksi Negara, dalam hal ini, Paradiplomasi telah merangsang geliat lokal dalam terwujudnya turu serta daerah dalam interaksi global.

Konsep paradiplomasi yang dikemukakan oleh Panavotis Soldatos dan dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh aktor sub nasional.

Duchacek menjelaskan paradiplomasi dalam tiga tipe. Tipe pertama adalah *transborder paradiplomacy*. Menunjuk pada hubungan institusional, formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah. Tipe yang kedua adalah *transregional paradiplomacy* yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun

²⁶ Crikemans, David, 2008 '*Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*', hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium. Dalam Takdir Ali, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta. Hal.38.

²⁷ Wolff, Stefan, 2009, '*Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*', hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham.

Negara di mana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berada berbatasan langsung dalam satu kawasan. Tipe yang ke tiga adalah *global paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia.

G. Hipotesa

Hipotesa yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah : Kebijakan mengenai praktik diplomasi Investasi asing yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah, mengingat propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu propinsi dengan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang mumpuni di Indonesia, selain itu juga menjadi pintu dari Kawasan Timur Indonesia. Apalagi fokus pemerintah terutama pasca ditetapkannya otonomi daerah, telah tertuju pada pentingnya investasi asing dengan bentuk partisipatif secara institusi dibuktikan dengan berdiri dan berbenahnya sebuah badan khusus yaitu BKPM Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, yang kedua lahirnya program-program Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang pro investasi asing baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap rencana yang telah terjabarkan dengan jelas dalam strategi dan kebijakan BKPM Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan diterbitkannya regulasi daerah pro investasi asing melalui hadirnya Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal Daerah, sehingga membuktikan semakin siapnya Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam menyambut investasi asing di Sulawesi Selatan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kebijakan dan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak asing melalui diplomasi peningkatan investasi asing dan untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan kerjasama yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan praktik diplomasi peningkatan investasi asing, maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini, jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2007 sampai 2014 dan berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet terpercaya ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan Beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai keamanan investasi yang terjadi dan foto kerjasama pihak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak asing. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti yang diperoleh dari Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Biro Kerjasama Propinsi Sulawesi Selatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Propinsi Sulawesi Selatan, Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Observasi

Observasi akan dilakukan dengan melalui pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tentang peningkatan investasi asing di Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini pihak Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Propinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sulawesi Selatan, Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dan Biro Kerjasama Propinsi Sulawesi Selatan yang paham dengan masalah kerjasama dan investasi asing yang terjadi di Sulawesi Selatan. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara melalui *face to face*, dan *via email* lewat internet, unduh melalui situs yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu: *BAB I*, Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas riset, tinjauan

pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II , Geliat Investasi asing di Sulawesi Selatan. Bab ini berisi gambaran umum mengenai Potensi dan hambatan dalam menyongsong menggeliatnya Investasi Asing di Sulawesi Selatan.

BAB III, Dinamika Regulasi Investasi Asing di Indonesia. Bab ini menggambarkan tentang dinamika regulasi Investasi asing di Indonesia.

BAB IV, Dinamika Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Melalui Diplomasi Investasi Asing oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Bab ini akan membahas tentang dinamika kebijakan diplomasi investasi asing oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan investasi asing.

BAB V , Kesimpulan Dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.